

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Politik adalah kekuasaan, yaitu merupakan kemampuan untuk mempengaruhi atau mengendalikan tindakan orang lain. Kekuasaan dalam konteks politik bisa bersifat formal, seperti yang dimiliki oleh pemerintah atau lembaga negara, atau informal, seperti pengaruh yang dimiliki oleh tokoh masyarakat atau kelompok tertentu. Politik juga mencakup pembuatan kebijakan, penyelesaian konflik, distribusi sumber daya, dan pembentukan identitas kolektif. Dengan demikian, politik memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana masyarakat diatur, bagaimana sumber daya didistribusikan, dan bagaimana hak serta kewajiban warganya ditetapkan.

Politik dapat dipahami sebagai suatu rangkaian proses yang dilakukan oleh individu dalam mengatur interaksi antar sesama dalam suatu negara. Hubungan tersebut kemudian diatur dan dilembagakan melalui aturan-aturan yang mencakup struktur kekuasaan dan otoritas (Zulkarnaen, 2021)

Politik adalah siapa memperoleh apa, kapan, dan bagaimana pembagian nilai-nilai oleh yang berwenang, kekuasaan dan pemegang kekuasaan pengaruh, tindakan yang diarahkan untuk mempertahankan dan atau memperluas tindakan lainnya (Zulhilmi, 2021). Politik adalah bidang yang berkaitan dengan cara kekuasaan dijalankan dan keputusan dibuat dalam suatu masyarakat. Hal ini melibatkan proses di mana individu atau kelompok mengorganisasikan, mengkomunikasikan, dan memperjuangkan kepentingan mereka, baik melalui institusi formal seperti pemerintah, maupun melalui saluran informal seperti

kelompok kepentingan dan lobi. Salah satunya Politik identitas telah menjadi peristiwa yang kerap muncul dalam berbagai konteks sosial di Indonesia, terutama di daerah yang memiliki keberagaman Marga dan budaya yang kaya.

Politik identitas merupakan konsep dalam ilmu politik yang merujuk pada kecenderungan individu atau kelompok untuk mendasarkan identitas politik mereka pada aspek-aspek sosial dan budaya tertentu seperti suku, agama, ras, atau Marga. Dalam konteks Indonesia, yang memiliki keragaman Marga dan budaya yang sangat kaya, politik identitas sering kali muncul dalam berbagai bentuk, terutama ketika kelompok-kelompok tertentu merasa perlu memperjuangkan kepentingan dan hak-hak mereka di tengah pluralitas masyarakat. Politik identitas muncul sebagai respons terhadap perasaan marginalisasi atau ketidakadilan yang dialami oleh kelompok tertentu. Dalam banyak kasus, identitas seperti suku, agama, atau marga menjadi alat yang digunakan untuk memperkuat solidaritas internal kelompok, memperjuangkan hak-hak kolektif, atau bahkan untuk mencapai tujuan politik tertentu. Di satu sisi, politik identitas dapat memperkuat rasa kebersamaan dan identitas kolektif suatu kelompok. Namun, di sisi lain, politik identitas juga dapat memicu eksklusivitas, perpecahan, dan konflik antar kelompok yang berbeda (L. machdani Afala, 2018)

Dalam masyarakat yang sangat plural seperti Indonesia, politik identitas sering kali memainkan peran penting dalam menentukan arah politik lokal dan nasional. Hal ini terutama terlihat dalam pemilihan umum, di mana kandidat politik dan partai sering kali mengandalkan dukungan dari kelompok-kelompok identitas tertentu untuk memenangkan suara. Namun, penggunaan politik identitas ini bisa berisiko ketika digunakan untuk memecah belah atau mendiskriminasikan

kelompok lain berdasarkan perbedaan identitas. Secara hukum, penggunaan politik identitas yang berlebihan atau yang bersifat diskriminatif telah diatur dan dilarang dalam Pasal 280 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Undang-undang ini melarang penggunaan pendekatan berbasis suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam kampanye politik, untuk mencegah perpecahan dan menjaga integritas proses demokrasi. Berbeda dengan yang terjadi di Aceh, tepatnya di Kabupaten Bener Meriah dimana dengan latar belakang sejarah dan budaya yang kuat sehingga memiliki sejarah politik yang kompleks dan dinamis, dipengaruhi oleh faktor-faktor historis, sosial, dan budaya termasuk memiliki otonomi khusus yang memberikan kewenangan lebih besar dalam mengatur urusan domestik, termasuk dalam hal politik dan pemerintahan (Mulyadi, Damayanti, et al., 2024)

Seperti halnya terjadi politik identitas Pada tahun 2023, Desa Situnggaling, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, melaksanakan pemilihan kepala desa yang menjadi studi kasus menarik tentang pengaruh politik identitas. Dalam pemilihan tersebut, Darwin Simarmata, Armando Simarmata, Fery Rasahman Simarmata dan Mona Sipayung bersaing untuk posisi kepala desa Situnggaling. Politik identitas, khususnya yang berbasis pada marga, memainkan peran yang sangat signifikan dalam proses pemilihan ini. Darwin Simarmata berhasil memenangkan pemilihan tersebut dengan strategi politik identitas yang memanfaatkan kekuatan marga Simarmata, yang merupakan salah satu marga dominan di desa tersebut. Marga dalam masyarakat Batak tidak hanya berfungsi sebagai identitas keluarga, tetapi juga sebagai simbol kekuatan sosial dan politik yang dapat menggerakkan dukungan secara luas. Keberhasilan

Darwin Simarmata menunjukkan bagaimana marga dapat mempengaruhi hasil politik di daerah yang masih mempertahankan struktur sosial tradisional. Di sisi lain, kandidat seperti Mona Sipayung yang berasal dari marga berbeda menghadapi tantangan besar dalam menarik dukungan di tengah dominasi marga Simarmata. Kasus ini menggarisbawahi bagaimana politik identitas berbasis marga masih berpengaruh kuat dalam menentukan hasil pemilihan dan mengatur dinamika sosial di masyarakat Batak, serta menyoroti tantangan yang dihadapi dalam menjaga keseimbangan antara identitas kultural dan integritas proses demokrasi.

Dalam konteks masyarakat Batak, terutama di daerah seperti Desa Situnggaling, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, politik identitas sering kali terkait erat dengan marga. Marga dalam masyarakat Batak adalah bagian integral dari identitas sosial dan budaya yang menentukan posisi seseorang dalam struktur sosial, termasuk dalam politik lokal. Identitas marga dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk siapa yang dipilih sebagai pemimpin, bagaimana sumber daya dibagikan, dan bagaimana keputusan dibuat di tingkat komunitas. Berbeda dengan di Aceh yang mana peran Teungku Dayah dilakukan untuk mempengaruhi mahasiswa dan masyarakat, namun dalam perkembangannya di Aceh, partai hanya menggunakan peran Teungku Dayah sebagai wahana meraih kemenangan. Ketika partai pemenang berkuasa, keterlibatan Teungku Dayah dalam pembuatan kebijakan pemerintahan di Aceh terpinggirkan (Muntasir & Aminullah, 2020).

Politik identitas dalam konteks marga Batak sering kali terlihat dalam pemilihan pemimpin adat, kepala desa, serta dalam proses pengambilan keputusan

lainnya. Marga menjadi penentu utama dalam distribusi kekuasaan, kesempatan ekonomi, dan status sosial di tengah masyarakat. Pengaruh politik identitas ini tidak hanya mengatur hubungan antar marga tetapi juga mempengaruhi interaksi antara masyarakat Batak dengan kelompok Marga lainnya. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam pemilihan pemimpin desa sangat berbeda dengan dengan pemilihan lurah. Pemilihan kepala desa, yang sering dikenal dengan istilah pilkades, adalah proses pemilihan kepala desa yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa setempat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan dalam latar belakang, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh politik identitas marga batak dalam pilkades 2023 di desa situnggaling?
2. Apa dampak politik identitas marga batak di desa Situnggaling?

1.3 Fokus Penelitian

Untuk memperjelas ruang lingkup permasalahan yang ada dalam penelitian ini, perlu ditentukan fokus penelitian berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diidentifikasi. Hal ini bertujuan agar informasi dan data yang diperoleh lebih terarah dan relevan dengan aspek-aspek yang menjadi objek kajian.

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah;

1. Analisis pengaruh politik identitas marga batak dalam pilkades 2023 di Desa Situnggaling.
2. Analisis dampak politik identitas marga batak di Desa Situnggaling.

1.4 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh politik identitas marga batak dalam pilkades 2023 di Desa Situnggaling.
2. Untuk mengetahui dampak politik identitas marga batak di Desa Situnggaling.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis,
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperluas wawasan dan pengetahuan di bidang pemilihan kepala desa, khususnya dalam konteks politik identitas. Dengan demikian, penelitian ini dapat berfungsi sebagai sumbangan pemikiran yang berguna untuk pengembangan kebijakan atau strategi dalam penyelenggaraan pilkades yang lebih adil dan transparan di masa depan.
 - b. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman baik bagi peneliti maupun pembaca, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai referensi atau tinjauan pustaka dalam kajian ilmu politik. Dengan begitu, penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi akademisi, tetapi juga bagi praktisi dan masyarakat luas yang tertarik untuk mendalami fenomena politik identitas dalam konteks pemilihan kepala desa di Indonesia.

2. Manfaat Praktis,

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai pengaruh dan dampak dari politik identitas marga Batak dalam proses pemilihan kepala desa. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk mengidentifikasi masalah yang muncul akibat praktik politik identitas, serta memberikan solusi yang konstruktif agar politik identitas tidak disalahgunakan sebagai alat untuk memenangkan kontestasi politik. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan pemilu kepala desa di masa depan dapat berlangsung lebih adil dan objektif tanpa adanya pengaruh negatif dari politik identitas yang mengarah pada perpecahan sosial.
- b. Bagi kalangan akademisi dan mahasiswa, penelitian ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat, terutama bagi mereka yang tertarik untuk mendalami topik serupa terkait pengaruh politik identitas marga Batak dalam pemilihan kepala desa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dan memperkaya literatur terkait fenomena politik identitas di Indonesia, sehingga dapat membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut yang berfokus pada aspek-aspek terkait dalam politik lokal.